

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan telah dibahas pada bab sebelumnya, formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung pembangunan daerah kawasan perbatasan negara di Kabupaten Kepulauan Talaud., maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Formulasi kebijakan dalam hal ini perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif Kebijakan untuk memecahkan masalah, penetapan kebijakan, maka dapat disimpulkan sudah berjalan sesuai dengan teori yang telah dibahas sebelumnya. Karena dalam tahap perumusan kebijakan di pemerintah provinsi Sulawesi Utara telah melibatkan secara aktif lembaga-lembaga pemerintah yang berkaitan dengan agenda kebijakan tersebut dan sesuai dengan landasan teori yang digunakan peneliti. Dalam hal ini instansi yang menjadi objek penelitian penulis yaitu: Kantor gubernur sulut, kantor Biro Perbatasan, Kantor Badan Pembangunan daerah (Bappeda), Kantor Badan keamanan laut (Bakamla) dan kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi Sulawesi Utara.
2. Implementasi kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung keamanan maritim.
Sejak di sahkannya RPJMD pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini untuk program pengembangan kawasan perbatasan baru dilaksanakan pada tahun 2017, sementara untuk anggaranya hanya Rp. 300 juta untuk tahun 2017 sehingga hanya beberapa agenda yang bisa dilaksanakan untuk pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai berikut:

- a. Pembangunan renovasi tugu perbatasan di pulau miangas yang akan dilaksanakan pada bulan oktober.
- b. Pengadaan jaringan televisi indovision di pos TNI AL dan masyarakat di pulau miangas, yang akan dilaksanakan pada bulan oktober.
- c. Pembangunan Bandara di pulau miangas yang sudah diresmikan pada bulan agustus 2017
- d. Pembangunan pelabuhan perikanan di kawasan Salibabu dan selanjutnya di kecamatan Beo, Rainis, dan Nanusa untuk menopang aktivitas perikanan tangkap di kabupaten talaud, yang sudah mulai di bangun sejak bulan mei 2017.
- e. Pengembangan ekonomi, berbagai bangunan seperti pasar, kantor pelabuhan, dan kantor bank juga didirikan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Pemerintah provinsi sulawesi utara sebaiknya membuat penerjemahan kegiatan dari program Pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan sesuai dengan draft RPJMD di Kabupaten Talaud dan bisa memberikan publikasi sejauh mana tahapan evaluasi kebijakan dalam pembangunan kawasan perbatasan.

5.2.2 Saran Praktis

Negara dalam hal ini pemerintah pusat seharusnya memberikan anggaran khusus untuk melaksanakan pengembangan kawasan perbatasan khususnya untuk menjamin agenda pertahanan dan keamanan laut.